

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut UUD No. 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang keseluruhan/sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah. Tujuan didirikannya BUMN menurut UUD No. 19 Tahun 2003 (pasal 2) untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan pada penerimaan negara pada khususnya. Permasalahan yang terjadi di BUMN adalah menjadi eksploitasi bersama. Situasi ini terjadi ketika satu atau sekelompok orang berusaha mendapatkan keuntungan pribadi dari setiap kegiatan BUMN, kegiatan tersebut jelas sangat merugikan negara. Karena keuntungan yang seharusnya dinikmati bersama justru dinikmati segelintir orang saja. Oleh karena itu perlu dilaksanakannya audit kinerja untuk menilai pencapaian kinerja setiap program, fungsi atau kegiatan dan untuk mengetahui adanya kecurang atau ketidakpatuhan yang merugikan negara.

Audit dalam arti yang luas adalah pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti-bukti informasi untuk menentukan kecocokan antara pernyataan dan kriteria yang sudah ditetapkan. Dengan adanya audit bisa memberikan keyakinan terhadap laporan Keuangan yang sudah disusun oleh manajemen. Audit sangat penting dilakukan disuatu instansi untuk mengetahui kondisi keuangan dalam mengambil sebuah keputusan. Laporan hasil audit juga dibutuhkan bagi pemerintah, para pemegang saham, bankir, investor, dan masyarakat yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap hasil operasi dan kinerja manajer.

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dilakukan oleh seorang pegawai untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh instansi. Untuk keberhasilan instansi ditentukan oleh bagaimana kinerja pegawai itu sendiri. Selain itu, manajer juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi instansi dan bagi pegawainya. Karena pegawai melakukan pekerjaan berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan oleh seorang manajer sebelum bekerja.

Audit kinerja bertujuan untuk menilai bagaimana hasil kinerja suatu instansi dan kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pihak yang bertanggung jawab, dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja suatu instansi.

Untuk menilai pencapaian kinerja BUMN dalam melaksanakan strategi yang didasarkan pada visi dan misinya, dapat dilakukan dengan mengaudit kinerja. Audit kinerja merupakan suatu proses sistematis dalam pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk melaksanakan penilaian kinerja suatu organisasi. Audit kinerja bertujuan untuk membantu untuk mengukur aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas, dengan tujuan mendorong ke arah perbaikan.

Audit kinerja BUMN dilaksanakan oleh Pemeriksa Intern Pemerintah. Di Indonesia Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan (BPKP) adalah lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional terhadap pengawasan kekayaan / keuangan negara. BPKP sebagai instansi pemerintah yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang *Auditing*, Manajemen dan Akuntansi, berperan sangat penting dalam mendorong proses pembaharuan di bidang manajemen pemerintahan.

BPKP dalam melaksanakan audit kinerja pada BUMN, menggunakan pedoman dalam audit kinerja yang berisi tahap pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun laporan praktek kerja lapangan dengan judul **“Pelaksanaan Audit Kinerja BUMN Pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana BPKP melakukan pelaksanaan audit kinerja pada BUMN?
2. Bagaimana BPKP melaksanakan Pengendalian Mutu dalam menjaga kualitas lapoan hasil audit?

1.3 Tujuan PKL

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu bentuk praktek kerja yang bertujuan untuk mendapatkan pengalaman di berbagai bidang melalui proses pembelajaran langsung dalam rangka memantapkan keprofesian pada suatu bidang ilmu tertentu. Adapun tujuan dilaksanakannya PKL di kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Sumatera barat antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana BPKP melaksanakan audit kinerja pada BUMN.
2. Untuk mengetahui bagaimana BPKP melaksanakan pengendalian mutu dalam menjaga kualitas lapoan hasil audit.



1.4 Manfaat PKL

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil praktek kerja ini, adalah :

A. Bagi Penulis

1. Mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kemampuan mencari informasi serta belajar memecahkan masalah berdasarkan ilmu yang dimiliki.

2. Dapat mempelajari tahap pelaksanaan audit kinerja pada BPKP dan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta wawasan.

3. Dengan adanya praktek kerja lapangan, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja secara tepat guna.

B. Bagi Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat

1. Mendapatkan bantuan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memperlancar kegiatan organisasi.

2. Dengan adanya mahasiswa praktek kerja lapangan, dapat membantu dan mempermudah *staff* kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pekerjaannya.

C. Bagi Pembaca

Laporan praktek kerja lapangan ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan pembaca mengenai peranan dan pelaksanaan audit kinerja BPKP.



1.5 Tempat dan Waktu PKL

Praktek kerja lapangan dilakukan di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat, Jl. Bypass Km. 14, Aie Pacah, Sungai Sapih, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat dipilih sebagai tempat untuk melaksanakan praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan ini akan dilaksanakan selama 40 hari kerja yaitu dari tanggal 5 juni 2017 s/d 4 agustus 2017.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar dapat memperoleh laporan ini maka penulis menyusun sistematika, Laporan Tugas Akhir dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**

Bab ini menguraikan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan praktek kerja lapangan, manfaat praktek kerja lapangan, tempat dan waktu praktek kerja lapangan, sistematika penulisan.

BAB II **Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan tentang pengertian audit pengertian dan maksud serta tujuan, sasaran, dan manfaat audit kinerja, standar audit kinerja, tahap pelaksanaan audit kinerja, dan deskripsi pelaksanaan audit kinerja.

BAB III **Gambaran Umum atau Profil BPKP**

Gambaran umum kantor perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat, yang berisi tentang sejarah berdirinya BPKP, visi dan misi BPKP, struktur organisasi,



produk dan layanan, serta wilayah kerjaperwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV Pembahasan

Bab ini berisikan pembahasan tentang pelaksanaan audit kinerja BUMN pada kantor perwakilan Badan pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera barat dan bagaimana BPKP melakukan pengendalian mutu.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil-hasil pembahasan dari pelaksanaan praktek kerja lapangan yang telah dilaksanakan.

